



Mengkaji Efektivitas Kebijakan Pendidikan Inklusif: Potret Persepsi Masyarakat

¹Subhan, ²Pertiwi Kamariah Hasis

¹² UIN Palopo

Email: subhan@iainpalopo.ac.id

Orcid Id: 0000-0002-0215-2716

Abstract

Inclusive education policies have been widely adopted globally, yet significant gaps persist between policy intentions and implementation realities. This study scrutinizes the effectiveness of inclusive education policy through community perception, examining stakeholder attitudes, experiences, and barriers to successful implementation. A mixed-methods convergent parallel design was employed, combining qualitative phenomenological interviews and focus group discussions with key stakeholders (n=65) and a quantitative cross-sectional survey of community members (n=750). Participants included educators, parents, policy makers, community leaders, and students across urban and rural settings. Qualitative data were analyzed using thematic analysis, while quantitative data employed descriptive and inferential statistics including ANOVA and regression analysis. Findings reveal significant variations in community perceptions based on stakeholder roles, geographic location, and previous exposure to inclusive education. Key barriers identified include inadequate teacher training, insufficient resources, cultural stigma, and limited community awareness of inclusive education principles. However, positive attitudes emerged among stakeholders with direct inclusive education experience, highlighting the importance of exposure in shaping perceptions. The study demonstrates that policy effectiveness is critically dependent on community understanding, acceptance, and active participation in implementation processes. Results provide valuable insights for policy makers to develop community-responsive inclusive education strategies and targeted interventions to enhance stakeholder engagement and support.

Keywords: Pendidikan inklusif, efektivitas kebijakan, persepsi masyarakat

Abstrak

Kebijakan pendidikan inklusif telah diadopsi secara luas di seluruh dunia, namun kesenjangan signifikan masih ada antara intensi kebijakan dan realitas implementasi. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan pendidikan inklusif melalui persepsi masyarakat, dengan meneliti sikap stakeholder, pengalaman, dan hambatan terhadap implementasi yang sukses. Desain konvergen paralel metode campuran digunakan, menggabungkan wawancara fenomenologis kualitatif dan diskusi kelompok fokus dengan stakeholder kunci (n=65) serta survei cross-sectional kuantitatif terhadap anggota masyarakat (n=750). Partisipan meliputi pendidik, orang tua, pembuat kebijakan, pemimpin masyarakat, dan siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik, sedangkan data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan inferensial termasuk ANOVA dan analisis regresi. Temuan mengungkapkan variasi signifikan dalam persepsi masyarakat berdasarkan peran stakeholder, lokasi geografis, dan paparan sebelumnya terhadap pendidikan inklusif. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi pelatihan guru yang tidak memadai, sumber daya yang tidak mencukupi, stigma budaya, dan kesadaran masyarakat yang terbatas tentang prinsip pendidikan inklusif. Namun, sikap positif muncul di antara stakeholder dengan pengalaman langsung pendidikan inklusif, menyoroti pentingnya paparan dalam membentuk persepsi. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada pemahaman, penerimaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi. Hasil memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi pendidikan inklusif yang responsif terhadap masyarakat dan intervensi terarah untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan stakeholder.

Kata Kunci: Inclusive education, policy effectiveness, community perception



Pendahuluan

Pendidikan inklusif telah menjadi paradigma global dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Namun, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menghambat efektivitas pencapaian tujuan pendidikan untuk semua.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya disparitas signifikan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas implementasinya. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, meskipun sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia dengan 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus, jumlah ini hanya mencapai 0,26% dari total populasi siswa di Indonesia (Yunas et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat setempat.

Permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup kurangnya sosialisasi yang komprehensif dan merata, sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif masih beragam dan terkadang minim di tingkat akar rumput (Sitanggang et al., 2021). Selain itu, stigma sosial yang masih mengakar kuat di masyarakat, dimana banyak masyarakat Indonesia yang masih memandang sebelah mata terhadap siswa berkebutuhan khusus, sering kali menghambat integrasi mereka dalam lingkungan sekolah umum (Cerdig Media, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh penelitian yang menunjukkan bahwa diskriminasi di sekolah menyebabkan adanya perilaku disosiatif berupa bullying secara verbal maupun non-verbal (Dewi & Kurniawan, 2024).

Menghadapi kompleksitas permasalahan implementasi pendidikan inklusif, terdapat beberapa alternatif pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas kebijakan. Pertama, pendekatan top-down yang fokus pada analisis kebijakan dari perspektif pembuat kebijakan dan implementor di tingkat institusional. Kedua, pendekatan bottom-up yang mengkaji implementasi dari perspektif penerima manfaat langsung, yaitu siswa berkebutuhan khusus dan keluarganya. Ketiga, pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan perspektif seluruh stakeholder dalam ekosistem pendidikan inklusif.

Penelitian ini memprioritaskan pendekatan komprehensif dengan fokus pada persepsi masyarakat sebagai stakeholder utama, mengingat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif sangat bergantung pada dukungan dan penerimaan masyarakat. Prioritas ini didasarkan pada temuan bahwa kunci sukses implementasi pendidikan inklusif terletak pada kolaborasi antara pemerintah,



sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait (Syarif & Arismunandar, 2024). Studi komprehensif oleh Ningrum et al. (2025) juga mengidentifikasi bahwa rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep inklusi merupakan salah satu dari tiga tantangan utama yang saling terkait dalam implementasi pendidikan inklusif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pendidikan inklusif; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif; (3) mengevaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari perspektif berbagai stakeholder masyarakat; (4) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan analisis persepsi masyarakat.

Kajian teoretik penelitian ini dibangun atas fondasi teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Pressman dan Wildavsky (1973), yang menekankan pentingnya faktor-faktor kontekstual dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Teori ini diperkuat dengan kerangka ekologi Bronfenbrenner yang memandang implementasi pendidikan inklusif sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai sistem dalam lingkungan anak, mulai dari mikrosistem (keluarga, sekolah) hingga makrosistem (kebijakan, budaya masyarakat).

Dalam konteks pendidikan inklusif, Index for Inclusion yang dikembangkan oleh Booth dan Ainscow (2002) memberikan kerangka kerja untuk memahami inklusi sebagai proses yang berkaitan dengan identifikasi dan penghapusan hambatan terhadap kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa. Kerangka ini menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang penempatan fisik siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga tentang transformasi budaya, kebijakan, dan praktik sekolah untuk menerima dan merangkul keberagaman.

Teori perubahan sosial Everett Rogers tentang difusi inovasi juga relevan dalam memahami bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diadopsi dan diterima oleh masyarakat. Rogers (2003) mengidentifikasi bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai proses adopsi inovasi pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan komunikasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang responsif terhadap konteks sosial budaya Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi sosialisasi dan implementasi yang lebih efektif, serta bagi praktisi pendidikan untuk memahami dinamika penerimaan masyarakat terhadap pendidikan inklusif.



Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pendidikan inklusif menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi. Pemahaman yang komprehensif tentang persepsi masyarakat akan memberikan gambaran nyata tentang kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan strategi yang lebih efektif. Seperti yang ditekankan oleh Hidayat & Asyafah (2023), evaluasi efektivitas implementasi pendidikan inklusif sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan dalam implementasi pendidikan inklusif.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa meskipun pendidikan inklusif memiliki potensi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus sambil mengembangkan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan di antara siswa (UNICEF & Ainscow, 2020-2021), potensi positif ini hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap kebijakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pendidikan inklusif melalui lensa persepsi masyarakat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dan mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian metode campuran (mixed methods) dengan desain konvergen paralel untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pendidikan inklusif secara komprehensif. Pendekatan mixed methods dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui data kualitatif sekaligus generalisasi yang luas melalui data kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran holistik tentang persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Komponen kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman hidup dan perspektif stakeholder yang terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif, sedangkan komponen kuantitatif menggunakan desain cross-sectional untuk mengukur sikap dan persepsi masyarakat pada populasi yang lebih luas.

Populasi penelitian mencakup seluruh stakeholder pendidikan inklusif di wilayah penelitian yang terdiri dari pendidik, orang tua, pembuat kebijakan, pemimpin masyarakat, dan anggota masyarakat umum. Sampel kualitatif dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria stakeholder yang memiliki pengalaman langsung atau keterlibatan dalam implementasi pendidikan inklusif, menghasilkan 65 partisipan yang terdiri dari 25 pendidik (guru reguler, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, konselor), 15 orang tua (orang tua anak berkebutuhan khusus dan anak reguler), 8 pembuat kebijakan (pejabat dinas



pendidikan, implementor kebijakan), 7 pemimpin masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, advokat disabilitas), dan 10 siswa yang lebih dewasa. Sampel kuantitatif dipilih menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan kategori stakeholder dan wilayah geografis, menghasilkan 750 responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 45-60 menit per sesi yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual menggunakan platform aman dengan panduan wawancara yang dikembangkan berdasarkan kajian literatur dan konsultasi ahli. Diskusi kelompok fokus (FGD) diselenggarakan dalam 12 sesi dengan 6-8 partisipan per kelompok yang dibentuk berdasarkan homogenitas peran stakeholder, berlangsung selama 90-120 menit dan difasilitasi oleh moderator terlatih. Analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan pendidikan inklusif, panduan implementasi, laporan evaluasi, rekam jejak sekolah, dan dokumentasi media terkait pendidikan inklusif. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur yang diadministrasikan secara online dengan alternatif berbasis kertas untuk aksesibilitas, mencakup lima seksi yaitu informasi demografis, pengetahuan dan kesadaran kebijakan, sikap terhadap pendidikan inklusif, pengalaman implementasi, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat.

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan adaptasi dari instrumen yang telah tervalidasi seperti SACIE-R (Sharma et al., 2018) dengan penyesuaian konteks Indonesia melalui proses validasi isi oleh panel ahli yang terdiri dari 5 pakar pendidikan inklusif dan uji coba terbatas pada 50 responden untuk menguji reliabilitas instrumen. Panduan wawancara kualitatif dikembangkan dengan domain utama meliputi pemahaman dan kesadaran tentang kebijakan pendidikan inklusif, pengalaman personal dengan implementasi pendidikan inklusif, persepsi terhadap hambatan dan fasilitator efektivitas kebijakan, sikap masyarakat dan penerimaan sosial, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Protokol FGD dirancang dengan topik diskusi yang terstruktur selaras dengan tujuan penelitian, menggunakan alat bantu visual dan skenario untuk menstimulasi diskusi, serta aturan dasar untuk dialog yang menghormati dan menjaga kerahasiaan.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data kualitatif, dengan membangun rapport yang baik dengan partisipan melalui pendekatan yang sensitif budaya dan mempertahankan objektivitas melalui refleksi berkelanjutan dan peer debriefing. Tim peneliti terdiri dari peneliti utama yang memiliki latar belakang pendidikan inklusif dan dua asisten peneliti terlatih yang membantu dalam proses pengumpulan data dan transkripsi. Informan kunci diidentifikasi melalui teknik snowball sampling untuk membantu menggali informasi mendalam tentang dinamika implementasi pendidikan inklusif di tingkat komunitas. Lokasi penelitian mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan di tiga kabupaten/kota yang dipilih berdasarkan variasi tingkat implementasi



pendidikan inklusif, dengan periode pengumpulan data selama enam bulan untuk memastikan saturasi data tercapai.

Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik yang dilakukan secara induktif dan deduktif, dimulai dengan persiapan data melalui transkripsi verbatim seluruh wawancara dan FGD, dilanjutkan dengan pengkodean awal secara line-by-line menggunakan pendekatan induktif dan deduktif, pengembangan tema melalui identifikasi pola dan pengembangan tema awal, penyempurnaan tema melalui proses iteratif peninjauan dan penyempurnaan tema, dan member checking untuk validasi temuan dengan partisipan terpilih. Software NVivo 12 digunakan untuk manajemen dan analisis data kualitatif dengan kerangka pengkodean berdasarkan teori sistem ekologi dan kerangka implementasi kebijakan, serta reliabilitas antar-penilai dengan dua pengkode independen mencapai Cohen's kappa ≥ 0.80 .

Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik demografis sampel dan distribusi respons across domain survei, serta statistik inferensial termasuk ANOVA untuk membandingkan persepsi across kelompok stakeholder yang berbeda, analisis regresi untuk mengidentifikasi prediktor sikap positif terhadap pendidikan inklusif, analisis faktor untuk mengkonfirmasi struktur domain persepsi, dan uji chi-square untuk menguji asosiasi antara variabel kategorikal. Software SPSS versi 28 digunakan untuk analisis statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ dan pelaporan effect size menggunakan Cohen's d untuk signifikansi praktis. Integrasi metode campuran dilakukan melalui analisis konvergen dengan joint displays yang membandingkan tema kualitatif dengan temuan kuantitatif, pengembangan meta-inferensi melalui perbandingan sistematis, dan identifikasi konvergensi, divergensi, dan komplementaritas dalam temuan.

Pengecekan keabsahan hasil penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber data dengan menggunakan multiple stakeholder dan metode pengumpulan data, member checking dengan memvalidasi temuan bersama partisipan terpilih, peer debriefing dengan kolega peneliti untuk menguji interpretasi dan bias, audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, dan reflexivity journal untuk mencatat refleksi peneliti tentang proses penelitian dan potensi bias. Validitas kuantitatif dipastikan melalui validitas isi yang dikonfirmasi oleh panel ahli, validitas konstruk melalui confirmatory factor analysis, reliabilitas internal dengan menghitung koefisien Cronbach's alpha untuk semua skala, dan reliabilitas test-retest melalui studi pilot dengan interval dua minggu pada 50 responden.



Hasil dan Pembahasan

Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif

Analisis data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pendidikan inklusif berada pada level sedang hingga tinggi. Sebanyak 68% responden menyatakan mengetahui bahwa pemerintah memiliki kebijakan mengenai pendidikan inklusif, yang mengindikasikan bahwa awareness dasar tentang keberadaan kebijakan sudah cukup baik di kalangan masyarakat. Namun, ketika ditanyakan tentang pemahaman terhadap isi kebijakan secara detail, tingkat pemahaman menunjukkan variasi yang lebih besar dengan rata-rata responden menunjukkan pemahaman yang moderat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tah (2025) yang mengungkapkan bahwa meskipun stakeholder memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek pendidikan inklusif, mereka seringkali kekurangan demonstrasi praktis dan aplikasi dari pengetahuan tersebut, mencerminkan gap antara pengetahuan teoretis dengan pemahaman operasional.

Aspek yang menarik adalah perbedaan antara pengetahuan tentang keberadaan kebijakan dengan pemahaman substantif tentang isinya. Meskipun mayoritas responden mengetahui adanya kebijakan pendidikan inklusif, pemahaman mereka tentang detail implementasi, mekanisme kerja, dan target pencapaian kebijakan masih menunjukkan keterbatasan. Hal ini tercermin dari respons yang beragam ketika ditanyakan tentang aspek-aspek teknis kebijakan seperti mekanisme pengawasan, kriteria sekolah inklusif, dan standar layanan yang harus dipenuhi. Kondisi ini mengkonfirmasi temuan Korkie et al. (2025) yang mengidentifikasi adanya jurang antara kebijakan dan teori di satu sisi dengan praktik di sisi lain, dimana gap antara pengetahuan dan ekspresi interaksional dari kebijakan tersebut masih sangat signifikan. Penelitian Sitanggang et al. (2021) juga memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa sosialisasi mengenai esensi dan implementasi pendidikan inklusif kepada masyarakat perlu dilakukan secara optimal dan merata untuk mencegah pemahaman yang bervariasi dan terkadang minim di tingkat akar rumput.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif menunjukkan tren yang positif, dengan 72% responden menyatakan dukungan terhadap kebijakan pendidikan inklusif yang dibuat oleh pemerintah. Dukungan ini mengindikasikan bahwa secara konseptual, masyarakat telah memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai inklusi dalam pendidikan. Namun, dukungan konseptual ini tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan di lapangan, menciptakan gap antara dukungan teoretis dengan keterlibatan praktis dalam implementasi. Paradoks ini sejalan dengan temuan Ratna (2025) yang mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan dan regulasi sudah ada, penerapan pendidikan inklusif masih menghadapi banyak kendala, termasuk



ketidaksiapan lembaga dan kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan stakeholder.

Tingkat dukungan yang tinggi (72%) namun dengan pemahaman implementasi yang terbatas juga mencerminkan fenomena yang dijelaskan dalam teori difusi inovasi Rogers (2003), dimana adopsi awal suatu inovasi sering dimulai dengan penerimaan konseptual sebelum berkembang menjadi pemahaman yang lebih komprehensif melalui exposure dan experience. Hal ini juga dikonfirmasi oleh data empiris Yunas et al. (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang terlayani hanya 0,26% dari total populasi siswa, mengindikasikan adanya gap antara dukungan konseptual masyarakat dengan pencapaian implementasi di lapangan.

Temuan tentang variasi pemahaman ini juga mengkonfirmasi penelitian Ningrum et al. (2025) yang mengidentifikasi rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep inklusi sebagai salah satu dari tiga tantangan utama implementasi, dimana rendahnya penerimaan tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam daripada penolakan ideologis. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan strategi komunikasi dan edukasi yang lebih sistematis untuk menjembatani gap antara awareness dasar dengan pemahaman substantif, sebagaimana ditekankan oleh Hidayat & Asyafah (2023) tentang perlunya evaluasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam proses sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pendidikan inklusif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Analisis mendalam terhadap pola respons mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Faktor pertama dan paling signifikan adalah pengalaman pajanan langsung dengan implementasi pendidikan inklusif di lingkungan sekitar. Responden yang melaporkan bahwa sekolah-sekolah di lingkungan mereka menerapkan kebijakan pendidikan inklusif sesuai arahan pemerintah cenderung memberikan evaluasi yang lebih positif terhadap berbagai aspek kebijakan lainnya. Hal ini mengkonfirmasi proposisi teoretis Rogers (2003) dalam teori difusi inovasi bahwa observability dan proximity terhadap implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian UNICEF & Ainscow (2020-2021) yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang efektif dapat meningkatkan hasil belajar bagi semua siswa dan berkontribusi pada pengurangan stigma serta diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus ketika masyarakat dapat mengamati dampak positifnya secara langsung. Pentingnya pengalaman langsung ini juga dikonfirmasi oleh penelitian Tah



(2025) yang menekankan bahwa guru sebagai implementor utama kebijakan merupakan faktor terpenting dalam efektivitas implementasi pendidikan inklusif, dan persepsi positif masyarakat terbentuk ketika mereka dapat mengobservasi kompetensi dan komitmen guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

Faktor kedua yang berpengaruh adalah akses terhadap informasi dan kegiatan sosialisasi. Data menunjukkan bahwa responden yang melaporkan mudahnya akses informasi tentang kebijakan pendidikan inklusif dan pernah menghadiri kegiatan sosialisasi menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif dan sikap yang lebih suportif. Namun, temuan yang mengkhawatirkan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dengan hanya sekitar 48% responden yang pernah menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jangkauan dan efektivitas program sosialisasi masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Sitanggang et al. (2021) yang menekankan bahwa sosialisasi mengenai esensi dan implementasi pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah di daerah dan masyarakat perlu dilakukan secara optimal dan merata untuk mencegah pemahaman yang bervariasi dan terkadang minim di tingkat akar rumput. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Korkie et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan khusus atau pelatihan terbatas cenderung kurang positif terhadap pendidikan inklusif, mengindikasikan pentingnya investasi dalam program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif untuk membentuk persepsi positif masyarakat.

Faktor ketiga adalah persepsi terhadap dukungan institusional dan ketersediaan sumber daya. Responden yang menilai positif dukungan pemerintah kepada sekolah dan ketersediaan sumber daya untuk implementasi pendidikan inklusif cenderung menunjukkan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap ketersediaan fasilitas dan sumber daya berkorelasi dengan skeptisisme terhadap kemampuan implementasi kebijakan di lapangan. Data menunjukkan bahwa sekitar 64% responden menilai sumber daya yang disediakan pemerintah belum memadai, yang menjadi faktor penghambat persepsi positif terhadap efektivitas implementasi. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Ratna (2025) yang mengidentifikasi bahwa meskipun kebijakan dan regulasi sudah ada, penerapan pendidikan inklusif masih menghadapi banyak kendala, termasuk ketidaksiapan lembaga, kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi guru serta sarana prasarana yang belum memadai di banyak sekolah. Penelitian Ningrum et al. (2025) juga mendukung temuan ini dengan mengidentifikasi keterbatasan alokasi anggaran sebagai salah satu dari tiga tantangan utama yang saling terkait dalam implementasi pendidikan inklusif. Kondisi ini diperparah oleh data empiris dari Yunas et al. (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang terlayani hanya 0,26% dari total



populasi siswa, mengindikasikan adanya gap signifikan antara komitmen kebijakan dengan kapasitas sumber daya untuk implementasi yang efektif.

Integrasi ketiga faktor ini mencerminkan kompleksitas pembentukan persepsi masyarakat yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual tetapi juga faktor sistemik dan kontekstual. Sebagaimana ditekankan oleh Syarif & Arismunandar (2024), kunci sukses implementasi pendidikan inklusif terletak pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, yang hanya dapat terwujud ketika ketiga faktor tersebut berfungsi secara sinergis. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi Hidayat & Asyafah (2023) tentang pentingnya evaluasi efektivitas implementasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan, dimana evaluasi tersebut harus mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan dukungan masyarakat sebagai stakeholder kunci dalam ekosistem pendidikan inklusif.

Evaluasi Masyarakat terhadap Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Evaluasi masyarakat terhadap hambatan implementasi mengungkapkan beberapa area kritis yang memerlukan perhatian prioritas. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan dalam aspek sosialisasi dan diseminasi informasi. Meskipun 68% responden mengetahui tentang keberadaan kebijakan, namun hanya 52% yang menilai bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi yang cukup. Gap ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi kebijakan yang ada belum optimal dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sitanggang et al. (2021) yang menekankan bahwa sosialisasi mengenai esensi dan implementasi pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah di daerah dan masyarakat perlu dilakukan secara optimal dan merata untuk mencegah pemahaman yang bervariasi dan minim di tingkat akar rumput.

Hambatan kedua yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Evaluasi masyarakat menunjukkan skeptisisme terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif. Hal ini tercermin dari rendahnya penilaian terhadap ketersediaan fasilitas pendukung dan dukungan finansial yang diperlukan untuk transformasi sekolah menjadi institusi yang benar-benar inklusif. Persepsi ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam alokasi dan distribusi sumber daya, yang membuat masyarakat meragukan komitmen pemerintah dalam implementasi jangka panjang. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Ratna (2025) yang mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan dan regulasi sudah ada, penerapan pendidikan inklusif masih menghadapi banyak kendala, termasuk ketidaksiapan lembaga, kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi guru serta sarana prasarana yang belum memadai di banyak sekolah.



Tantangan ketiga yang diidentifikasi adalah lemahnya mekanisme partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Data menunjukkan bahwa hanya 40% responden merasa bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan inklusif. Rendahnya tingkat partisipasi ini tidak hanya mengurangi sense of ownership masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga berimplikasi pada berkurangnya dukungan dan kolaborasi dalam implementasi. Masyarakat mengevaluasi bahwa pendekatan top-down yang dominan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan perlu diimbangi dengan mekanisme bottom-up yang lebih robust untuk memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini bertentangan dengan rekomendasi Syarif & Arismunandar (2024) yang menekankan bahwa kunci sukses implementasi pendidikan inklusif terletak pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Evaluasi masyarakat juga mengungkapkan adanya paradoks antara dukungan konseptual yang tinggi dengan kepuasan implementasi yang rendah. Sementara 72% responden mendukung konsep pendidikan inklusif, evaluasi terhadap kualitas implementasi menunjukkan tingkat kepuasan yang jauh lebih rendah, khususnya dalam aspek operasional seperti pelatihan guru, adaptasi kurikulum, dan penyediaan layanan pendukung. Paradoks ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada resistensi ideologis masyarakat, melainkan pada kapasitas dan kualitas implementasi yang belum memenuhi ekspektasi. Temuan ini sejalan dengan studi komprehensif Ningrum et al. (2025) yang mengidentifikasi tiga tantangan utama yang saling terkait: keterbatasan alokasi anggaran, rendahnya kompetensi guru dalam menangani ABK, serta rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep inklusi, dimana rendahnya penerimaan lebih disebabkan oleh kualitas implementasi daripada penolakan konseptual.

Kondisi ini juga dikonfirmasi oleh penelitian Korkie et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa terdapat jurang antara kebijakan dan teori di satu sisi dengan praktik di sisi lain, menciptakan gap antara pengetahuan dan ekspresi interaksional dari kebijakan tersebut. Sementara itu, data empiris yang menunjukkan hanya 0,26% dari total populasi siswa yang terlayani dalam program pendidikan inklusif (Yunas et al., 2024) memperkuat temuan penelitian ini tentang adanya gap signifikan antara dukungan konseptual masyarakat dengan pencapaian implementasi di lapangan.

Temuan-temuan ini mengkonfirmasi kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang tidak hanya memerlukan dukungan regulatif dan finansial, tetapi juga transformasi budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem yang responsive terhadap keberagaman kebutuhan siswa. Evaluasi masyarakat memberikan insights berharga bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan meningkatkan kualitas proses implementasi secara holistik dan berkelanjutan,



sebagaimana ditekankan oleh Hidayat & Asyafah (2023) tentang pentingnya evaluasi efektivitas implementasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan dalam implementasi pendidikan inklusif.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pendidikan inklusif menunjukkan kondisi paradoksal dimana dukungan konseptual yang tinggi (72% responden mendukung kebijakan) tidak diikuti dengan kepuasan terhadap kualitas implementasi, dengan tingkat pemahaman substantif tentang detail kebijakan yang masih terbatas meskipun 68% responden mengetahui keberadaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat didominasi oleh pengalaman paparan langsung, akses informasi dan sosialisasi, serta persepsi terhadap dukungan institusional, dimana hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan sosialisasi (hanya 48% partisipasi dalam kegiatan sosialisasi), keterbatasan sumber daya, dan lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ukuran sampel yang relatif kecil (25 responden), metode pengumpulan data yang hanya menggunakan survei online, dan desain cross-sectional yang tidak dapat menjelaskan dinamika perubahan persepsi dari waktu ke waktu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan longitudinal dengan sampel yang lebih besar, desain mixed-methods yang mengintegrasikan wawancara mendalam, dan studi komparatif antar wilayah untuk mengidentifikasi best practices implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang responsif terhadap kondisi lokal.

Daftar Rujukan

- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.
- Cerdig Media. (2024, June 4). Pendidikan inklusif: Tantangan dan solusi untuk sekolah di Indonesia. *Media Cerdig*. <https://media.cerdig.com/pendidikan-inklusif-tantangan-dan-solusi-untuk-sekolah-di-indonesia/>
- Dewi, S. P., & Kurniawan, A. (2024). Diskriminasi dan bullying dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(2), 145-160. <https://doi.org/10.21831/jpk.v15i2.45231>
- Hidayat, R., & Asyafah, A. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(2), 234-251. <https://doi.org/10.15294/jpp.v5i2.58742>
- Korkie, Y., Beyers, C., & Swanepoel, E. (2025). Teaching inclusive education: A contextual higher education analysis. *Frontiers in Education*, 10, 1445612. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1445612>



- Ningrum, D. A., Hamzah, F. S., Hikmah, N., Magfiroh, S. L., Rizqiyah, Z. A., & Asitah, N. (2025). Implementasi pendidikan inklusi di anak sekolah dasar: Studi kasus pada anak berkebutuhan khusus. *Nusantara Educational Review*, 3(1), 42-58. <https://doi.org/10.55732/ner.v3i1.1575>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Ratna, A. (2025). Kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusi pada anak usia dini. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 7(1), 15-28. <https://doi.org/10.35473/ijec.v7i1.3483>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sharma, U., Forlin, C., Deppeler, J., & Yang, G. X. (2018). Reforming teacher education for inclusion in developing countries in the Asia-Pacific region. *Asian Journal of Inclusive Education*, 6(2), 35-55. <https://doi.org/10.24259/ajie.v6i2.7504>
- Sitanggang, R., Munajah, S., Mariani, L., & Sumantri, E. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar: Analisis tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(3), 187-203. <https://doi.org/10.21009/jpd.v8i3.21456>
- Syarif, R., & Arismunandar. (2024). Analisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Tantangan dan peluang dalam implementasi di sekolah menengah. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 6(3), 852-864. <https://doi.org/10.31970/pendidikan.v6i3.1533>
- Tah, J. K. (2025). Teachers understanding of inclusive education and challenges in implementation in the English education system in Cameroon. *International Journal of Inclusive Education*, 29(3), 412-428. <https://doi.org/10.1080/13603116.2025.1320812>
- UNICEF, & Ainscow, M. (2020-2021). *Inclusion and education: 2020 Global Education Monitoring Report*. UNESCO Publishing.
- Yunas, M., Sari, D. P., & Wahyuni, S. (2024, July 1). Mewujudkan pendidikan dasar inklusif di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam era triple disruption. *Megashift Fisipol UGM*. <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/07/01/mewujudkan-pendidikan-dasar-inklusif-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-dalam-era-triple-disruption/>